

---

**Rahmayandi Mulda**

Dosen Universitas Kepulauan Riau  
Email: [rahmayandim@yahoo.co.id](mailto:rahmayandim@yahoo.co.id)

**Suranto**

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Email: [suranto\\_umy@yahoo.com](mailto:suranto_umy@yahoo.com)

<http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2014.0019>

## Kinerja Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kota Makassar dalam Mewujudkan *Good Governance* Tahun 2010-2012

---

### ABSTRACT

The problems in this study include how the performance of the NGOs in achieving Good Governance and the factors that affect the NGOs in achieving Good Governance. The study aimed to know and describe the performance of the NGOs to achieve Good Governance and also to know the factors that influence the performance of the NGOs in doing so. The study showed that the performance of the NGOs in Makassar to achieve good government from 2010 to 2012 is good. This good performance works on the objects under the study which are Kopel, ACC, LBH APIK, and OXFAM and can be seen from the works that those NGOs conducted such as encouraging financial transparency of the local government, enhancing the accountability of the work of local government, encouraging the rule of law in the country, developing agreement orientation to the government, encouraging the equality between the government and the public, responding to a variety of problems that occur in the country, and encouraging the efficiency and effectiveness of government work. Meanwhile, the factors that affect the performance of the NGOs in achieving Good Governance are the human resource factors, the donating agencies, the accountability of the NGOs, the independence, the networks, the idealism and leadership. The government should facilitate the NGOs which have good work performance and are well-trusted by the public as they have contributions to the nation development. The NGOs should receive a serious attention by all related parties from the government and the society. It is because the NGOs function as a bridge between the public and the government. As the NGOs are directly connected with the donors from the developed countries, it is possible that there can be particular intentions or interests that those countries put through the NGOs.

Keywords: work performance, NGOs, Good Governance

### ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja lembaga swadaya masyarakat dalam mewujudkan good governance dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja lembaga swadaya masyarakat dalam mewujudkan good governance. Metode penelitian digunakan adalah metode penelitian kualitatif dimana peneliti mengobservasi secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melakukan pengkajian dan analisis mendalam terhadap data yang ditemukan di lapangan yang kemudian dituangkan kedalam bentuk tulisan deskriptif. Hasil kesimpulan penelitian kinerja lembaga swadaya masyarakat di kota Makassar dalam mewujudkan Good Governance dari tahun 2010 sampai 2012 dengan objek penelitian beberapa LSM di kota Makassar seperti Kopel, ACC, LBH APIK, dan OXFAM, menunjukkan kinerja yang baik hal ini dapat dilihat dari kinerja yang sudah dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat seperti mendorong transparansi keuangan pemerintah daerah, mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, mendorong kepastian hukum dalam negara, membangun orientasi kesepakatan kepada pemerintah, mendorong kesetaraan antara pemerintah dan masyarakat, merespon berbagai masalah yang terjadi dalam negara, mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lembaga swadaya masyarakat dalam

---

mewujudkan Good Governance adalah faktor sumber daya manusia, lembaga donor, akuntabilitas LSM, independensi, jaringan, idealisme dan kepemimpinan. Lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kinerja yang baik dan dipercaya oleh masyarakat harusnya difasilitasi oleh negara karena telah berkontribusi dalam pembangunan, LSM harus mendapat perhatian secara serius oleh semua kalangan utamanya dari pemerintah dan masyarakat karena LSM berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pememrintah, selain itu LSM bersentuhan langsung oleh lembaga donor yang berasal dari negara maju dan tidak menutup kemungkinan ada agenda atau kepentingan dari negara maju tersebut yang dimasukkan melalui LSM.

Kata kunci: *Kinerja, LSM, dan Good Governance*

## **PENDAHULUAN**

Masalah korupsi dan pelayanan publik yang masih di keluhkan oleh sebagian besar masyarakat hal ini menjadi masalah yang serius yang dialami oleh negara Indonesia, meskipun beberapa kebijakan atau regulasi yang relevan seperti TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa, UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN, UU Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004, UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Serta Deretan UU Sektorial, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Maupun Peraturan Daerah (Lele: 2010) jika diamati ternyata belum mampu membawa perubahan secara nyata.

Menurut Sesatyo (2012) perilaku korupsi di daerah, berawal dari jorjoran para calon pemimpin daerah yang telah melontarkan dana yang sangat besar demi memenangi pilkada. Namanya juga keluar modal besar, tentu saja berharap modal mereka tak hanya kembali tetapi juga meraup laba berlipat. Tidak mengherankan jika praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh begitu subur yang ada di daerah.

Selama ini birokrasi/birokrasi lokal sering memperoleh berbagai cemohan yakni terlalu lamban, terlalu kaku dan birokratis, tidak profesional, kurang peka, sensitif, responsif, bagaikan pangreh praja dari pada pamong praja, bagai keranjang sampah, dan lebih

mengedepankan kekuasaan, kewenangan dari pada pelayanan (Utomo, 2009). Hal seperti ini memperlihatkan bahwa betapa buruknya pelayanan publik yang ada di daerah-daerah.

575

Masalah yang terjadi diatas juga menjadi perhatian serius oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik secara nasional maupun secara lokal, berbagai gerakan atau agenda program kerja yang sudah dilakukan seperti halnya mendorong ditetapkannya UU pelayanan publik yang kemudian ditetapkan pada tahun 2009 dan masih banyak agenda-agenda lainnya sudah dilakukan. Culla (2006:9) mengungkapkan bahwa, bila ditelisik lebih cermat, Ornop atau LSM dalam hal ini, telah banyak memberi sumbangan berarti pada perjalanan politik negeri ini. Misalnya aksi-aksi Ornop bertipe advokasi dalam membela, menyadarkan dan membangkitkan perlawanan masyarakat dalam mempertahankan hak-hak sosial, politik, dan ekonomi yang “dikorbankan” oleh rezim dalam berbagai proyek pembangunan. Kuatnya gerakan *civil society* seperti lembaga swadaya masyarakat,serta perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan berbagai kasus penyimpangan dalam birokrasi pemerintahan menjadi pemicu munculnya wacana *good governance* (pemerintahan yang baik) untuk memulihkan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan Negara.

Kota Makassar merupakan salah satu daerah dianggap memiliki masalah kasus korupsi yang cukup serius seperti yang dilangsir oleh temuan LSM FITRAH bahwa kota Makassar telah menempati urutan kedua terkorup setelah ibukota Jakarta dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia, jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 80 miliar dan lebih dari 496 kasus (<http://makassar.tribunnews.com//2012/10/02/kejati-tunggu-data-kongkret-fitra>).

Selain masalah kasus korupsi masih ada masalah lain seperti buruknya pelayanan publik yang ada di kota Makassar, seperti yang di ungkapkan oleh komisioner Ombusman kota Makassar Laode

576

Arumahi di kota Makassar, Dia mengatakan, kasus lain adalah pelayanan yang berlarut-larut dan persoalan transparansi. berdasarkan data Ombusman kota Makassar diketahui pada periode 2009 tercatat 311 kasus pengaduan layanan publik, kemudian pada tahun 2010 turun menjadi 210 kasus pengaduan. sementara 2011 tidak jauh berbeda dengan jumlah pengaduan pada 2010. Lebih lanjut masih dalam kaitan yang sama namun sumber berita yang berbeda, menyatakan bahwa Ombudsman banyak menerima pengaduan terutama masalah pendidikan dan pelayanan di kelurahan menjadi kasus yang paling banyak diadukan di Ombusman kota Makassar. Hal itu disampaikan Ketua Ombusman Makassar, Mulyadi Hamid dalam acara pemaparan akhir tahun di kantor Ombudsman, Kamis, 27 Desember. Mulyadi mengatakan sepanjang tahun ini (2012), ada 175 kasus pengaduan yang masuk. 155 di antaranya merupakan kasus pelayanan publik. 20 pengaduan lainnya merupakan kasus privat atau masalah dengan perusahaan swasta. Objek penelitian merupakan LSM yang berada di kota Makassar berupa LSM Komisi Pemantau Legislatif, Anti Corruption Committee, LBH APIK, dan OXFAM namun LSM tersebut memiliki wilayah kerja yang cukup luas seperti halnya Kopel memiliki wilayah kerja secara nasional, ACC wilayah kerja se-Sulawesi, LBH Apik juga memiliki Wilayah kerja se-Sulawesi Selatan dan OXFAM Sulawesi yang berkantor di Makassar, memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Sulawesi dan beberapa daerah di sekitarnya, jadi wilayah kajian penelitian ini meliputi wilayah kerja Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjadi objek kajian.

### **KERANGKA TEORI**

Menurut Mahnun (2009) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja bisa

diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan, kriteria ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Menurut Bastian (2007) faktor penentu kualitas dan kuantitas aktifitas-aktifitas organisas. Empat faktor tersebut secara simultan akan menunjang peran-peran LSM dalam pelaksanaan programnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan, ada pula faktor lain yang berpengaruh terhadap peran-peran suatu LSM.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh sebuah LSM tidak lain adalah staf dan relawan. Faktor staf/relawan berperang sangat penting dan berpengaruh terhadap peran LSM, karena SDM merupakan unsure inti dari organisasi.

2. Material/Bahan

Keberadaan sumber daya material ini jelas harus ada. Apa arti sebuah proses jika sesuatu yang dip roses tidak ada.

3. Dana

Suatu organisasi tidak akan mungkin mencapai tujuannya jika tidak mempunyai sumber daya berupa dana. Dana ini sangat diperlukan dalam membelanjai operasi-operasinya. Pada dasarnya, LSM merupakan organisasi nirlaba atau non-profit yang tidak terlibat dalam kegiatan mencari keuntungan, sehingga pelaksanaan suatu program LSM sering bergantung pada para donator.

4. Peralatan/Teknologi

Faktor teknologi sangat penting dalam organisasi, karena berkenaan dengan proses transformasi dalam organisasi dimana enenrgi mekanis dan intelektual dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan daya yang langka (Steers,

1985:83). Selain itu, tingkat kemajuan teknologi juga memainkan peranan yang berarti dalam jalur penentuan produk dan jasa yang akan diproduksi, peralatan yang digunakan, dan bagaimana operasi akan dikelola (Handoko,1999:67). Dengan teknologi, peralatan-peralatan yang tercipta dipergunakan untuk memperlancar program aksi menuju sasaran organisasi.

Heyzer ( dalam Heyzer, Ryker, and Quizon, 1995:8) Dalam buku Gaffar (2006: 203) Politik Indonesia, transisi menuju demokrasi, mengidentifikasi tiga jenis peranan yang dapat dimainkan oleh berbagai NGO yaitu:

1. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat “*grassroots*”, yang sangat esensial, dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerja sama, baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya.
3. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Sementara itu, masih dalam buku Gaffar (2006:203-204), Corrothers dan Suryatna (dalam Tadashi Yamamoto, 1995:129-130) mengungkapkan hal yang hampir sama, dengan menekankan pada dimensi politik. Mereka mengidentifikasi empat peranan yang dapat dimainkan oleh kalangan NGO dalam sebuah negara, antara lain:

1. Katalisasi perubahan sistem. Hal ini dilakukan dengan jalan mengangkat sejumlah masalah yang penting dalam masyarakat, membentuk sebuah kesadaran global, melakukan advokasi demi perubahan kebijaksanaan negara. mengembangkan kemauan politik rakyat, dan mengadakan eksperimen yang mendorong inisiatif masyarakat.
2. Memonitorin pelaksanaan sistem dan cara pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan negara, bahkan bila perlu melakukan

protes. Hal ini dilakukan karena bisa saja terjadi penyelenggaraan kekuasaan, pelanggaran hukum, terutama yang dilakukan oleh pejabat negara dan kalangan *business*.

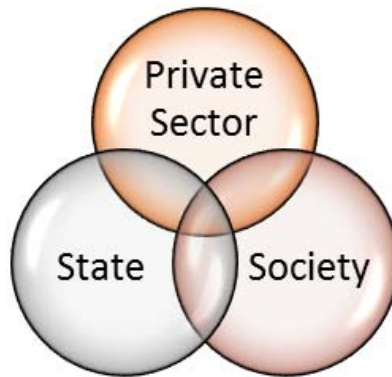
3. Memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan lembaga peradilan. Hal ini dilakukan karena tidak jarang warga masyarakat menjadi korban kekerasan itu. Kalangan NGO muncul secara aktif untuk melakukan pembelaan untuk bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan.
4. Implementasi program pelayanan. NGO dapat menempatkan diri sebagai lembaga yang mewujudkan sejumlah program dalam masyarakat (Andra L. Corrothers, 1995, Estie W. Suryatna dalam Tadashi Yamamoto, 1995: 129-130, dalam Gaffar, 2006).
5. Dalam buku Sedarmayanti (2012: 4) Governance menurut World Bank adalah *the way state power is used in managing economic and social resources for development an society*. Sedangkan menurut UNDP, *governance adalah the exercise of political, economic, and aministrative authority to manage a nation's affair at levels*.

World Bank mengemukakan bahwa wujud *good governance* adalah sebuah Pelayanan publik yang efektif & efisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan serta pemerintahan yang bertanggung jawab pada publiknya, Mencakup kehidupan yang luas (sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Dalam pemanfaatan sumber daya alam, keuangan dan manusia (World Bank, 1992).

Dalam Syakrani & Syahrani (2009) *good governance menurut institute on governance (IOG) adalah governance refers to the institutions, processes, and traditions which define how powers is exercised, how decisions are made, and how decision are made on issues of public concerns*.

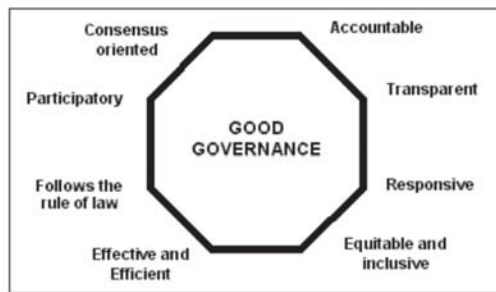
Menurut Sedarmayanti (2012, Hal 5), institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *privat*

**580** *sector* ( sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. *State* menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, *privat sector* menciptakan pendapatan dan pekerjaan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.



GAMBAR 1:HUBUNGAN ANTARA SEKTOR  
*Sumber: Sedarmayanti, 2012.*

GAMBAR 2: PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*



Source: UN-ESCAP, Bangkok, Thailand

## METODE PENELITIAN

Melihat permasalahan yang akan diteliti diatas tentang bagaimana kinerja Lembaga Swadaya Masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Lembaga Swadaya Masyarakat dalam



mewujudkan *Good Governance* maka metode pendekatan penelitian sosial yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, menurut Bungin (2013;124) data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek. Pendapat yang lain juga diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Moleong,2005;5) bahwa Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan format penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, menurut Bungin (2013;48) penelitian sosial menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik kepermukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu.

## **PEMBAHASAN**

### **KINERJA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* 2010-2012.**

Kinerja Lembaga Swadaya Masyarakat jika dilihat dari peranannya yang dimainkan selama ini dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yakni dalam bidang politik dan non politik, LSM yang menjadi objek kajian dalam bidang politik adalah Kopel, ACC dan LBH Apik. LSM yang bergerak dalam bidang politik meliputi kinerja dalam mewujudkan transparansi ( KOPEL mendorong transparansi anggaran pemerintah daerah kepada publik), akuntabilitas (KOPEL mendorong pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada publik), responsibility (KOPEL merespon setiap masalah pelayanan dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang terjadi dalam masyarakat), efektif dan efisiensi (KOPEL mendorong agar pemerintah bersifat efektif

**582** dan efisien dalam menjalankan kinerja pemerintahan), orientasi kesepakatan (Kopel Mendorong Pemerintah Daerah untuk Bekerja Sama dalam Merumuskan Kebijakan atau Peraturan Daerah yang Didasarkan pada Orientasi Kesepakatan), kepastian hukum (ACC Mengadvokasi Berbagai Masalah Kasus Korupsi dan LBH Apik Mendorong Perlindungan Hukum Kepada Perempuan). Sedangkan dalam bidang non politik yang menjadi kajian adalah lembaga OXFAM merupakan NGO Internasional, tolak ukur kinerja OXFAM dalam mewujudkan *Good Governance* meliputi partisipasi (Kinerja Oxfam dalam mengentaskan kemiskinan, memberdayakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat miskin serta mengembangkan kehidupan masyarakat) dan kesetaraan (Kinerja Oxfam dalam mendorong kesetaraan antara masyarakat, pemerintah dan swasta serta mendorong Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki).

TABEL 1: LSM POLITIK DAN NON POLITIK DALAM *GOOD GOVERNANCE*

### KINERJA LSM DALAM BIDANG POLITIK

Kinerja NGO dalam ranah politik yakni sebagai wahana untuk menjembatangi warga masyarakat dengan negara atau pemerintah dalam hal penegakan hukum, pengontrol, meningkatkan pengaruh politik secara meluas, bahkan ikut ambil bagian dalam menentukan

arah dan agenda pembangunan, dalam kaitannya dengan *Good Governance*, NGO sangat berperan aktif dalam mendorong transparansi pemerintah, akuntabilitas pemerintah, daya responsibilitas pemerintah, efektifitas dan efisiensi pemerintah, orientasi kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat, serta mendorong kepastian hukum dalam negara.

583

Berikut ini merupakan uraian tentang hubungan antara kinerja NGO dalam mewujudkan *Good Governance* dari tahun 2010 sampai 2012, sebagai studi kasus dari penelitian ini adalah NGO yang ada di kota Makassar.

Salah satu NGO yang berada di kota Makassar yang dinilai oleh peneliti kinerjanya cukup baik adalah Komisi Pemantau Legislatif, NGO ini merupakan lembaga yang aktif dalam ranah politik, hal ini dapat dilihat dari ruang lingkup kinerjanya, Kopel secara rutin melakukan pemantauan kinerja anggota DPRD untuk tiga fungsi yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi, Kopel aktif memberikan koreksi dan masukan kepada DPRD untuk penyusunan prolegda dan penyusunan Peraturan Daerah (PERDA). Biasa juga Kopel langsung mengajukan draf naskah akademik untuk disusun menjadi PERDA. dalam fungsi penganggaran KOPEL sering memberikan koreksi dan masukan untuk pembahasan APBD. Kopel biasanya menganalisis rancangan APBD apakah sudah berpihak pada masyarakat dan atukah anggaran tersebut boros dan berpotensi dikorupsi. Pendapatan revenues-revenues nihil disampaikan ke lembaga DPRD lewat pendengaran dan media. Untuk pemantauan kinerja penegakan kode etik dan DPRD, KOPEL memberikan masukan dan daftar isi contents yang disertai artikel baru bukti-bukti revenues pemantauan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD. Setiap tahunnya Kopel membuat satu buku yang terkait artikel baru Koperasi Bhakti Samudra DPRD. Buku-buku inisial berisi dokumentasi praktik terbaik yang dilakukan DPRD atau modul dan juknis pelaksanaan fungsi DPRD. Hingga sekarang, Inisial Kopel

**584** telah menyusun modul penyusunan tata tertib DPRD, panduan praktis menilai LKPJ kepala daerah dan LPJ realisasi, panduan pengawasan dana alokasi khusus (DAK). Buku-buku ini telah didistribusikan hampir keseluruhan DPRD di Indonesia (Wawancara BKM, 25 Februari 2013).

### KINERJA KOPEL DALAM MENDORONG TRANSPARANSI ANGGARAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PUBLIKNYA

Cara Kopel dalam mendorong transparansi anggaran dan kebijakan pemerintah daerah adalah melakukan berbagai analisis dan kajian mendalam terhadap APBD, melakukan pendampingan secara berkesinambungan pada pemerintah daerah selain itu Kopel juga melakukan pemantauan secara langsung terhadap kinerja anggota DPRD dan pemerintah daerah, dari hasil temuan yang didapat oleh Kopel biasanya dipublikasikan kemedi dan melaporkan kepihak yang berwajib.

Pada tahun 2009-2010, Kopel bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar, Kabupaten Tana Toraja, Bantaeng, dan Luwu Timur mempublikasikan APBD dalam bentuk Poster dan Baliho untuk transparansi anggran kepada publik. Salah satu contoh kasus temuan Kopel dalam melihat dan menganalisis penyelenggaraan keuangan pemerintahan di daerah adalah Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar, Kopel menuntut kepada pemerintah daerah agar PD Parkir segera di audit karena dalam hasil pengawasan Kopel menemukan terjadi penyimpangan pada perusahaan tersebut terdapat penyelewengan anggaran dari pendapatan PD Parkir sekitar 6,6 miliar tahun 2011 dan yang hanya disetor kekas daerah hanya Rp 169 juta. Dalam berita media koordinator Kopel Indonesia mengungkapkan bahwa *“karena kalau dilihat dari sisi pendapatan dengan kontribusi ke PAD, itu sangat tidak masuk akal. Karena itu perlu diaudit.”* ujar Syamsuddin Alimsyah, kepada PAJAR, Jumat 16

Nopember 2012. Anggota Komisi B DPRD Makassar, Wahab Tahir juga mengakui adanya kejanggalan dari pengelolaan pajak parkir. Dia juga setuju jika dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan manajemen PD Parkir.

Samsuddin Alimsyah menambahkan, ada dua sektor sumber PAD di Kota Makassar yang diduga mengalami kebocoran setiap tahun. kedua sektor yang dimaksud adalah pajak parkir dan pajak perhotelan. kondisi ini, kata dia, karena lemahnya sistem yang digunakan dalam penetapan nilai pajak, baik hotel maupun parkir. “Dalam pembahasan APBD setiap tahun, eksekutif melaporkan target setorannya, misalnya Rp 20 miliar, pada akhir tahun nanti di setorkan Rp 21 miliar, maka semua bertepuk tangan. Pada hal, sebenarnya mereka mampu menghasilkan Rp 40 miliar, Cuma yang dilaporkan hanya 21 miliar. Jadi ini modus menyembunyikan pendapatan,” Papar Syamsuddin.

### **KINERJA KOPEL DALAM MENDORONG PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMPERTANGGUNJAWABKAN HASIL KINERJANYA.**

Salah satu kegiatan Kopel dalam mendorong akuntabilitas pemerintah daerah yakni aktif mengikuti acara refleksi akhir tahun kinerja anggota DPRD Makassar (Majid Bati, 13 Juli 2013). Dalam acara tersebut Kopel biasanya banyak menyampaikan tuntutan kepada pemerintah agar pemerintah daerah sebisa mungkin mempertanggung jawabkan apa yang sudah menjadi tugas dan fungsinya seperti fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi oleh DPRD.

Kegiatan lain yang dikerjasamakan KOPEL dengan Uni Eropa adalah program “*Consolidation of Civil Society in Monitoring the Accountability of Local Budget*”. Program ini dilaksanakan di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kabupaten Bantul Provinsi DI. Yogyakarta.

Dari penjelasan LPJ Kopel tahun 2010 dan 2011 menyebutkan bahwa program ini bertujuan mendorong akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Anggaran yang akuntabel adalah proses yang terjadi dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran daerah yang dilakukan secara transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tahapan pembahasan di DPRD harus melalui tahapan konsultasi publik untuk memastikan bahwa alokasi anggaran yang tersedia dalam APBD adalah untuk pemenuhan dan pelayanan kepentingan bagi masyarakat. Begitu juga adanya jaminan perlindungan bagi masyarakat atas sebuah kebijakan pemungutan retribusi untuk peningkatan PAD dilakukan berdasarkan aturan yang pasti serta diyakini tidak memberatkan masyarakat. Bahkan dalam tahapan pelaksanaan anggaran tersebut juga diawali dengan tahapan sosialisasi kepada publik. Peristiwa atau tindakan pengelolaan anggaran tersebut dipastikan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku.

#### KINERJA KOPEL DALAM MERESPON SEPERTI MASALAH PELAYANAN KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN GENDER

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kopel sebagai wujud kepeduliannya terhadap kondisi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dari tahun 2010-2012 adalah *Consolidation of civil society in monitoring the local budgeting in parepare, bantul and kupang*, selain itu kopel juga melakukan Penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan DAK pendidikan di Sulawesi Selatan (Sumber: LPJ KOPEL 2010-2012).

Kopel dalam merespon masalah pendidikan dikarenakan banyaknya masalah penyimpangan atau penyelewengan terhadap dana-dana pendidikan yang ada di daerah dari penjelasan Kopel menyebutkan:

*Sebagaimana kita ketahui bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan merupakan dana perimbangan yang bersumber dari*

*pemerintah pusat yang masuk dalam mekanisme APBD di daerah-daerah yang penerima DAK Pendidikan. Program ini dilaksanakan dengan melihat banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengeloaan dana ini. Pada tahun 2009, KPK menemukan dugaan penyimpangan dalam sistem pengelolaan DAK Pendidikan sebesar Rp 2,2 triliun. Dari hasil kajian, KPK menemukan tiga kelemahan: i) adanya ketidaksesuaian pengalokasian dana DAK; ii) penyimpangan pemanfaatan dana; dan iii) sulitnya pengawasan karena tidak semua pemerintah daerah mau menyampaikan laporan kepada Departemen Pendidikan Nasional.*

Kinerja Kopel dalam merespon masalah pendidikan dan kesehatan adalah melakukan evaluasi Perda Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis program kerja ini didorong untuk merespon berbagai masukan masyarakat setelah program ini dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008. Hingga tahun 2010 ini, banyak masalah dari kedua Perda tersebut. Persoalan ini menjadi grapan KOPEL selama tahun 2010. Melalui kerjasama dengan International Republican Institut (IRI), advokasi Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan oleh KOPEL dengan membentuk Gugus Tugas untuk proses advokasinya. Beberapa *stakeholder* yang terkait dengan masalah ini turut ikut bergabung, antara lain dari pemerhati pendidikan, akademisi, NGO, Ormas, organisasi profesi, pengusaha, turut ambil bagian dalam NGO, Ormas, organisasi profesi, pengusaha, turut ambil bagian dalam gugus tugas ini. Kerja-kerja advokasi untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah terkait dengan Pendidikan dan Kesehatan Gratis dilakukan. Sasaran advokasi lebih banyak kepada Badan legislasi DPRD Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah dan Media Massa untuk kampanye. Advokasi Perda Pendidikan dan Kesehatan Gratis ini merupakan tindaklanjut dari hasil riset KOPEL tahun 2009 tentang masalah peningkatan mutu pendidikan dan masalah layanan kesehatan di Sulawesi Selatan (LPJ Kopel 2010).

## **588 KINERJA KOPEL DALAM MENDORONG PEMERINTAH DAERAH AGAR MEMPERHATIKAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KINERJANYA.**

Peran serta LSM dalam negara memberi kontribusi besar terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, berbagai kasus pelanggaran atau penyalagunaan kekuasaan sudah banyak yang diungkap, baik melalui media massa maupun sampai ke pengadilan.

Beberapa kinerja Kopel dalam mendorong efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dengan analisis kegiatan Kopel dalam melakukan pengawasan, monitorin, asistensi ataupun pemantauan kepada pemerintah daerah dalam uraian Laporan Pertanggungjawaban Komisi Pemantau Legislatif.

Berikut merupakan kinerja Kopel dalam mendorong efektifitas dan efisiensi yang diuraikan dalam laporan pertanggung jawaban dari tahun 2010-2012.

1. Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah
2. Monitoring Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah
3. Asistensi Penyusunan Peraturan Bupati

Kegiatan yang dilakukan oleh Kopel dalam diatas dapat mempengaruhi terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah karena dalam proses pelaksanaannya terus dilakukan pemantauan atau pengawasan oleh lembaga swadaya masyarakat dan jika ada penyimpangan atau tidak sesuai prosedurnya akan mudah kedapatan dan jika perlu dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

### **KOPEL MENDORONG PEMERINTAH DAERAH UNTUK BEKERJA SAMA DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN ATAU PERATURAN DAERAH YANG DIDASARKAN PADA ORIENTASI KESEPAKATAN.**

Kinerja Kopel dalam mendorong orientasi kesepakatan dalam



hal kebijakan publik dan mendorong peraturan daerah pada pemerintah daerah, DPRD maupun masyarakat. Upaya yang dilakukan Kopel adalah untuk menjembatangi masyarakat dan pemerintah daerah dalam sebuah kesepakatan bersama, seperti halnya pada program yang dilakukan Kopel di tahun 2011, *Building Budget for Women and the Poor*, kegiatan tersebut didasari karena selama ini anggaran pemerintah daerah dinilai oleh masyarakat kurang memihak masyarakat kecil, sebagian besar anggaran hanya dihabiskan pada belanja rutin seperti gaji pegawai dan perjalanan dinas maka dari itu Kopel mendorong program anggaran yang pro terhadap gender dan masyarakat miskin adapun strategi atau cara yang dilakukan oleh Kopel dalam mendorong kebijakan anggaran yang pro kepada gender dan masyarakat miskin diuraikan dalam laporan pertanggung jawaban tahun 2011.

589

Program kerja sama dengan *The Asia Foundation* (TAF) melalui program B3WP dilaksanakan di Kabupaten Sinjai dan Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Awal program ini KOPEL membentuk sebuah tim kerja, tugasnya adalah untuk menjalankan program *Building Budget for Women and the Poor* (B3WP) berdasarkan pada agenda, target dan tujuan yang ingin dicapai, baik di manajemen KOPEL maupun tim di 2 kabupaten, kabupaten tersebut adalah Kabupaten Sinjai dan Luwu Timur. Setelah terbangunnya kesepakatan antara Kopel dengan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Sinjai dan kabupaten Luwu Timur mengenai rencana program B3WP dengan mendapatkan dukungan dari pemerintahan daerah, DPRD dan masyarakat sipil. Dengan demikian, program ini dapat berjalan dengan baik selama tahun 2011.

Program *Building Budget for Women and the Poor* (B3WP) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemantau Legislatif (KOPEL) dinilai cukup sukses karena program ini terus berlanjut dan lembaga donor terus memberi bantuan atau kerja sama dari tahun ketahun kepada KOPEL dalam menjalankan program ini.

Kegiatan Kopel dalam mendorong orientasi kesepakatan antara pemerintah daerah dari tahun 2010 adalah melakukan beberapa kegiatan tentang advokasi PERDA di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, Kota Medan, Kabupaten Karo dan Kota Todore, daerah-daerah tersebut mengusulkan beberapa PERDA Hak Inisiatif dan KOPEL melakukan asistensi atas proses penyusunan mulai dari penyusunan hak inisiatif hingga penyusunan draf Perda.

Perda gagasan KOPEL dari tahun 2010-2012 diatas merupakan bentuk kerja sama dengan beberapa pemerintah daerah dan anggota legislative dalam mendorong pemerintah daerah untuk bekerja sama dalam merumuskan kebijakan atau peraturan daerah yang didasarkan pada orientasi kesepakatan, dengan bentuk kerja sama tersebut akan terbangun sebuah hubungan atau kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah selain itu kebijakan publik akan lebih memihak kepada masyarakat karena ada Kontrol dan asistensi langsung dari Lembaga Swadaya Masyarakat.

Adanya kesepakatan antara masyarakat (LSM) dan pemerintah daerah akan mendorong sebuah proses pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam negara dan orientasi kesepakatan akan berjalan dengan baik apabila ada partisipasi dan kesetaraan dalam sebuah negara. Masyarakat, Pemerintah dan swasta dalam menjalankan fungsi dan perannya harus berlandaskan pada kesepakatan diantara pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Masyarakat sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam negara, apa bila hak-hak warga negara tidak terpenuhi, hal ini akan menimbulkan suatu ketidak stabilan dalam suatu negara tersebut.

#### **KINERJA ACC DAN LBH APIK MENGADVOKASI BERBAGAI MASALAH KASUS KORUPSI DAN MENDORONG PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEREMPUAN**

NGO dalam mendorong *rule of law* di wilayah kota Makassar yang cukup aktif adalah LBH Apik dan *Anti Corruption Committee*

(ACC) selain itu OXFAM dan Kopel juga ikut terlibat namun OXFAM dalam mendorong kepastian hukum tidak terlibat secara langsung hanya menjadi mitra kerja LBH Apik, beda halnya dengan Kopel keterlibatannya hanya sebatas sebagai memantau penyimpangan yang terjadi pada pemerintah daerah kemudian melaporkan atau membeberkan penyimpangan tersebut ke media maupun ke pihak yang berwajib.

*“Keberadaan ACC di kota Makassar untuk memberantas masalah kasus korupsi, karena selama ini korupsi nyata adanya namun seolah dibiarkan saja, ACC dalam menjalankan kegiatannya sifatnya mandiri, independen tidak mau tergantung pada pemerintah apalagi sama pejabat negara, ACC hanya mengandalkan pada anggotanya baik dari segi pendanaan maupun waktu mereka dalam mengurus masalah kasus korupsi tersebut selain itu dalam menangani masalah kasus korupsi ACC bermitra dengan YLBHI Makassar dan beberapa lembaga lainnya yang satu visi dengan ACC” ungkap ketua ACC (Abdul Muttalib 20 Juli 2013).*

ACC dalam menangani kasus-kasus korupsi bekerja sama dengan berbagai pihak seperti KPK, YLBHI Makassar dan beberapa lembaga mitra lainnya.

Dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang ada di daerah Sulawesi Selatan cukup memprihatinkan dari sebuah media online menyebutkan sepanjang tahun 2012, sebanyak 11 kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi dan Polda Sulselbar mandek alias jalan di tempat, dan 7 kasus ditutup. Data kasus korupsi tersebut diberikan Lembaga Bantuan Hukum Makassar.

Beberapa kasus tersebut yang di dorong oleh ACC adalah kasus dana Bansos, sampai saat ini masih ditangani namun penyelesaiannya berjalan sangat lambat di tingkat Kejaksaan Tinggi dan Polda sama halnya dengan Kasus dugaan korupsi PT Perkebunan Nusantara XIV juga dinilai telah merugikan negara hingga Rp 100 miliar masih dalam proses demikian juga kasus pengadaan lahan Celebes

**592** Convention Centre (CCC) yang terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 3,4 miliar juga sementara dalam proses.

Banyaknya kasus korupsi yang mandek atau jalan ditempat yang ada di kota ketua YLBH Makassar (Abdul Azis, 28/12/2012) mengungkapkan, LBH Makassar mendesak kepada Kejati dan Polda Sulselbar untuk menuntaskan beberapa kasus korupsi di Sulsel yang stagnan dan mandek. Juga mendesak KPK untuk menggunakan kewenangannya yakni Pasal 9 poin b UU No.30 tahun 2002 untuk mengambil alih proses penanganan kasus korupsi di Sulsel dengan alasan telah berlarut-larut dan tertunda tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta mendesak Kejagung dan Kapolri untuk melakukan evaluasi dan melakukan audit kinerja, terutama dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Sulsel.

Dari sisi lain Koordinator ACC mengungkapkan kepada, TRIBUN-TIMUR.COM- ACC Sulsel menilai Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan sangat lamban dalam hal memproses dan menyelesaikan semua perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Sulsel. Padahal korupsi tersebut mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Koordinator Badan Pekerja ACC Sulsel, Abdul Muthalib, mengatakan, sedikitnya ada 12 kasus korupsi yang ditangani jaksa penyidik bagian pidana khusus Kejati Sulsel. "Berkas kasus tersebut hanya dijadikan sebagai bahan bacaan saja, dan tidak pernah diproses lebih lanjut," ujarnya, Sabtu (9/11/2013). Ia menambahkan, kejaksaan seharusnya pihak serius dalam menangani kasus korupsi. Kejaksaan sangat lamban dalam menangani kasus tersebut padahal SDM kejati cukup banyak. Melihat dari hal tersebut ACC, akan melakukan koordinasi dengan kejaksaan dan membantu pihak kejaksaan untuk menuntaskan kasus korupsi yang ada di Sulsel. Karena setelah pergantian adpidsus, kinerja kejaksaan sangat kendor, sangat lamban.

Lembaga Swadaya Masyarakat lain yang cukup aktif namun hanya

terfokus pada bidang tertentu yakni LBH Apik yang memfokuskan diri pada masalah kasus hukum yang dialami oleh perempuan dan anak. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dari tahun 2010 hingga tahun 2012 yakni:

1. Program peningkatan pemahaman publik atas sistem peradilan dan akses pada keadilan Gender di Sulsel, kerja sama Oxfam NZ, 2009-2010.
2. Program *We can campaigning*, kerja sama Oxfam Nobib-LBH Apik Jakarta, 2009-2012.
3. Program peningkatan pemahaman publik atas system peradilan dan akses pada keadilan Gender di Sulsel, kerja sama Oxfam NZ, 2010-2011.
4. Program peningkatan kapasitas paralegal, kerja sama Oxfam Novib-federasi APIK Indonesia
5. Program *We can campaigning*, kerja sama Oxfam Nobib-LBH Apik Jakarta, 2009-2012.
6. Program hukum, sosial dan ekonomi perempuan dan anak di kota Makassar, kerja sama Oxfam NZ 2011-2012.
7. Program klinik hukum E2J, kerja sama The Asia Foundation dengan USAID 2012-2015.

(Sumber: Dokumen LBH APIK Makassar)

Beberapa kinerja LBH Apik pada umumnya lebih banyak bekerja sama dengan OXFAM. Kegiatan LBH Apik dalam kurung waktu tiga tahun terakhir dari tahun 2010 hingga 2012 banyak menjangkau program yang sifatnya memberdayakan dan meningkatkan kapasitas perempuan dalam bidang hukum.

#### **KINERJA OXFAM BERPARTISIPASI DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN, MEMBERDAYAKAN DAN MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT.**

Pada dasarnya semua LSM menjangkau fungsi partisipasi dalam

**594** negara karena LSM sebagai organisasi kemasyarakatan yang ikut berpartisipasi dalam mewujudkan tata kelola negara yang baik. Seperti halnya bagaimana LSM ikut terlibat dalam penegakan hukum, memberdayakan masyarakat, mengawasi atau melakukan fungsi kontrol terhadap proses pemerintahan sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi anggaran serta kinerja pemerintah, menjaga dan melestarikan lingkungan, mendorong akuntabilitas dan transparansi.

Beberapa Wujud partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat OXFAM dalam mengentaskan kemiskinan, memberdayakan masyarakat dan mengembangkan kehidupan masyarakat adalah seminar pemberdayaan perempuan 21 Maret 2011 di Makassar dilaksanakan oleh Oxfam dari seminar ini ada tiga hasil penelitian dan studi yang dipaparkan kepada peserta yakni Studi Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Tingkat Kecamatan dan Desa di Wilayah Pesisir di Sulawesi Selatan (The Indonesian Institut), Sensitivitas Gender dalam Manajemen Sumber Daya Alam (Peneliti Ratna Fitriani dan Tim) dan Situasi yang Mempengaruhi Pengembangan Bisnis “Puspita Bahari” Sebuah Kelompok Nelayan Perempuan di Morodemak Kabupaten Demak, Jawa Tengah (LBH Semarang) (Oxfam/Ist).

Salah satu kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Oxfam yang lain adalah pembuatan kripik pisang, pada tahun 2010 di Pulau Tanakeke, Kabupaten Takalar, dari kegiatan ini hasil produksi kripik pisang tersebut sudah bisa dipasarkan di supermarket yang ada dikota-kota seperti Makassar, Takalar daerah-daerah sekitarnya.

Memberdayakan perempuan dengan memproduksi Teh Kalli-Kalli yang bahan utamanya dari Daun Mangrove di Desa Cikoang Kabupaten Takalar, kegiatan sekolah lapang ini berlangsung dari tahun 2012. Menurut Daeng Baso kegiatan ini sangat diapresiasi oleh masyarakat hal ini terlihat dari keseriusan para ibu-ibu rumah tangga mengikuti kegiatan ini, berikut ini hasil petiakan wawancara

dengan Daeng Baso.

Pembuatan Gula Nipah, Kelurahan Palantikang Kabupaten Takalar mulai dikembangkan pada tahun 2012, kegiatan pembuatan gula nipah ini merupakan hasil dari pengembangan Daeng Nai. Nipah selama ini hanya dimanfaatkan sebagai bahan baku Ballo yang merupakan minuman khas masyarakat Palantikan. Awal pengembangan gula Nipah ini mulai setelah Daeng Nai mengikuti kegiatan sekolah lapang yang di laksanakan oleh Oxfam di tahun 2012.

#### **KINERJA OXFAM DALAM MENDORONG KESETARAAN ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN SWASTA SERTA MENDORONG KESETARAAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI**

Dalam wujud *Good Governance*, kesetaraan merupakan suatu keharusan dalam negara, kesetaraan yang dimaksud adalah kesetaraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam mendorong kesetaraan tersebut LSM sebagai organisasi yang lahir dari masyarakat dijadikan sebagai alat untuk memperkuat masyarakat itu sendiri, program yang dijalankan oleh LSM seperti pemberdayaan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah masing-masing (dalam bidang ekonomi), mendorong kesetaraan perempuan dan laki-laki (Gender), meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hukum utamanya kaum perempuan (dalam bidang hukum). Selain itu Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai organisasi masyarakat sipil dalam wujud *Good Governance* dituntut untuk bisa setara dengan pemerintah dan swasta. Keberadaan NGO sebagai representasi dari masyarakat sipil sebisa mungkin mampu memainkan peranan tersebut. Beberapa hal yang menjadi peranan LSM atau NGO yang dianggap setara dengan pemerintah adalah mampu terlibat dalam pembuatan rancangan kebijakan dan mendorong peraturan publik, salah satu contohnya adalah Undang-Undang Pelayanan Publik yang

memiliki sejarah yang panjang hingga disahkan tahun 2009, hal ini merupakan salah satu hasil kinerja keras oleh para NGO/OMS secara nasional serta pihak-pihak yang terkait seperti MENPAN, jaringan akademisi yg berjumlah 12 orang, serta anggota DPR RI yang mensahkan UU tersebut. Kopel sebagai simpul Sulawesi Selatan salah satu dari sekian banyak NGO yang ikut berperan serta atas disahkannya Undang-Undang tersebut yang tergabung dalam MP3 dan sampai sekarang MP3 masih aktif dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik tahun 2009.

Selain itu bentuk kesetaraan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat adalah aktif dalam mengatasi persoalan kenegaraan seperti masalah pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, *Project Restoring Coastal Livelihood 2010-2015* yang dilaksanakan oleh Oxfam, dan berbagai masalah lingkungan banyak diselesaikan oleh Walhi adalah merupakan wujud dari kesetaraan NGO dengan lembaga pemerintahan, karena apa yang sudah dilakukan tersebut juga menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam negara.

Kesetaraan yang lain yang didorong oleh NGO adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, beberapa kegiatan yang sudah dilakukan adalah anggaran yang pro gender yang diperjuangkan oleh Kopel kepada pemerintah daerah dan DPRD, OXFAM memberdayakan perempuan dan memberi pemahaman tentang gender kepada masyarakat baik melalui seminar maupun melalui pelatihan atau workshop, selain itu LBH Apik Makassar meningkatkan kapasitas pemahaman perempuan tentang hukum sehingga perempuan tidak diremehkan oleh kaum laki-laki dan jika perempuan menghadapi masalah hukum hal ini diharapkan bisa menanganinya sendiri selain itu LBH Apik juga memberi perlindungan hukum kepada kaum perempuan.



## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

597

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebagai berikut:

### A. FAKTOR SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang dimaksud disini adalah orang-orang yang terlibat aktif dalam dunia Lembaga Swadaya Masyarakat. Ada banyak orang yang terlibat dalam kegiatan LSM namun sifatnya simpatisan (tidak tetap) atau hanya terlibat dalam kegiatan LSM hanya sesaat. Beberapa LSM mengalami kemajuan yang sangat luar biasa karena didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan fokus pada LSM yang digelutinya. Salah satu contoh LSM yakni KOPEL merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang saat ini merupakan LSM yang terbesar di kota Makassar, awalnya merupakan LSM lokal namun sekarang telah memperluas wilayah kerjanya sampai ke tingkat nasional, memiliki kantor tetap dan mampu membeli beberapa aset seperti tanah (Majid Bati, 25 juli 2013), hal demikian karena KOPEL di tolong oleh sumber daya manusia yang cukup baik dan loyal terhadap Kopel. Sama halnya dengan YASMIB yang sekarang juga sudah memiliki kantor tetap di wilayah kota Makassar, berkat para pendiri YASMIB yang konsisten dan terus mendorong para anggotanya untuk meningkatkan kapasitas para anggotanya (Asis Paturungi, 17 juli 2013), dan sekarang telah menjadi mitra dan kepercayaan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.

### B. LEMBAGA DONOR

Lembaga donor menjadi penggerak dalam menjalankan berbagai program LSM, namun tidak semua lembaga donor bisa mengatur LSM begitu saja, ada beberapa LSM yang tidak mau terikat dengan lembaga donor seperti halnya Walhi, mereka tidak mau menerima atau mereka menolak bantuan dari lembaga donor yang terlibat

dalam perusakan lingkungan (Wawan, 3 juli 2013), dan beberapa NGO lain seperti Fik Ornop tidak menerima bantuan dari lembaga donor yang sifatnya mengikat, ACC menjalankan programnya secara Mandiri tanpa bantuan dari lembaga donor, KOPEL tidak menerima dana dari pemerintah yang sumbernya dari APBN maupun dari APBD serta kritis dalam membangun kerja sama dengan lembaga donor. Dari wawancara dengan para pimpinan NGO seperti Direktur YLBHI Makassar, Kopel, Yasmib, FIK Ornop, dan Walhi mengatakan NGO harus bersikap kritis dengan lembaga donor atau yang ingin memberi bantuan karena justru dapat merugikan masyarakat.

#### C. AKUNTABILITAS LSM

Kepercayaan atau akuntabilitas menjadi salah satu alasan mengapa NGO bisa bertahan sampai puluhan tahun dari Hasil Wawancara Ketua FIK Ornop Makassar, Asram Jaya, pada tanggal 2 juli 2013, mengatakan bahwa untuk bisa LSM bertahan lebih lama harus bisa membangun kepercayaan dari masyarakat itu sendiri dengan cara bekerja untuk kepentingan masyarakat banyak. Ada banyak LSM namun tidak bisa bertahan lebih lama karena tidak adanya kepercayaan dari publik tersebut, begitupun lembaga-lembaga NGO yang lain seperti Kopel, Yasmib, dan YLBHI Makassar, NGO tersebut bisa bertahan sampai puluhan tahun karena bisa membangun kepercayaan kepada masyarakat dan lembaga donornya.

#### D. INDEPENDENSI DAN KEMANDIRIAN

Independensi dan kemandirian Lembaga Swadaya Masyarakat adalah merupakan nilai yang dipegang oleh beberapa LSM dengan alasan tidak ingin terjebak pada sikap pragmatis. LSM adalah lembaga yang bebas yang memperjuangkan ke pentingan masyarakat banyak, jika tidak independen dan mandiri dalam bekerja mereka akan kehilangan nilai-nilai perjuangannya. Mereka tidak ingin

perjuangan yang mereka gagas tergadaikan dengan kepentingan penguasa yang tidak pro kepada masyarakat, pihak swasta maupun lembaga donor yang ingin merugikan kepentingan masyarakat banyak. Alasan mengapa beberapa LSM selektif dalam memilih lembaga donor ataupun menolak dana-dana dari pemerintah karena tidak ingin kinerja mereka diinterpendensi.

#### E. JARINGAN

Lembaga Swadaya Masyarakat jika ingin maju harus memiliki jaringan yang luas, memiliki mitra baik secara lokal, nasional, maupun internasional, biasanya untuk mendapatkan dana dari lembaga donor harus dengan melalui jaringan mitra lembaga. Lembaga donor tidak ingin bekerja sama dengan NGO jika belum diakui kinerjanya secara umum atau dikenal oleh berbagai NGO lainnya.

#### F. IDEALISME

Hal yang membuat LSM tetap eksis adalah idealisme yang dimiliki oleh para pendiri dan pengurus LSM tersebut. Banyak LSM yang timbul tenggelam bahkan tidak pernah aktif lagi karena memiliki berbagai masalah utamanya masalah keuangan dan tidak ada program kerja yang mereka lakukan. Namun beberapa LSM tetap bertahan dan mengalami kemajuan karena idealisme yang mereka miliki dan mereka tetap bertahan, mereka bekerja dengan hati tanpa berharap banyak pada gaji. Kadang kala mereka tidak mendapatkan gaji dari lembaga LSM selama beberapa bulan karena tidak ada program yang mereka jalankan dari lembaga donor (Majid Bati, 25 Juni 2013), bahkan lembaga seperti ACC yang merupakan lembaga mandiri yang bekerja tanpa gaji bahkan mereka menyisihkan gaji mereka sebagai advokat atau pengacara untuk kegiatan ACC (Abdul Muthalib 12 Juli 2013).

## G. KEPEMIMPINAN

Kepemimpinan dalam Lembaga Swadaya Masyarakat sangat di tentukan oleh kemajuan LSM tersebut. Pada umumnya pemimpin LSM menjadi tokoh utama dalam mengarahkan LSM-nya tersebut. Beberapa LSM yang sudah mapan seperti KOPEL dan YASMIB tidak terlepas dari kepemimpinan mereka yang memiliki kapasitas yang luar biasa. Samsuddin Alimsyah sebagai pendiri sekaligus sebagai ketua KOPEL. Begitupun dengan Asis Paturungi sebagai Pendiri YASMIB dan sampai sekarang masih menjabat sebagai ketua LSM tersebut. Mereka telah sampai puluhan tahun menggeluti LSM sehingga mereka mengetahui dengan baik kondisi LSM yang mereka kelola.

## KESIMPULAN

1. Kinerja Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Mewujudkan *Good Governance* pada tahun 2010 sampai 2012, dengan objek penelitian di beberapa LSM yang berada di kota Makassar seperti Kopel, ACC, LBH Apik dan OXFAM maka dapat disimpulkan LSM tersebut diatas mampu mendorong terwujudnya *Good Governance* dengan baik. Kinerja yang LSM dalam mewujudkan *Good Governance* seperti mendorong transparansi pemerintah daerah, mendorong pemerintah daerah agar bertanggung jawab kepada publiknya, merespon setiap masalah yang terjadi dalam negara, mendorong pemerintah daerah agar bekerja secara efektif dan efisien, mendorong kesepakatan dengan pemerintah daerah, mendorong penegakan hukum (kepastian hukum), mendorong peran serta atau partisipasi masyarakat dalam negara, dan mendorong kesetaraan dalam negara
2. Faktor yang mempengaruhi kinerja LSM yang ada di kota Makassar dalam mewujudkan *Good Governance* adalah sumber daya manusia, idealisme, konsistensi, independensi, akuntabilitas,

adanya dukungan pendanaan dari lembaga donor, jaringan, kepemimpinan dan kerja sama dari pemerintah daerah.

601

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimin. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bastian Indra. 2007. *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Bogdan Robert C and Sari Knopp Biklen. 1982. *Qualitative Research for education: an Introduction to Theory and Methods*. Boston: Alin and Bacon.
- Budiharga Wilarsa, Dkk. 2007. *Organisasi Masyarakat Sipil: Pembelajaran Penguatan Kapasitas Untuk Perubahan Sosial*. Jakarta: RemdecSwa Prakarsa.
- Bungin, Burhan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif, (aktualisasi, Metodologis ke arah ragam varian kontemporer)*. Jakarta: Rajawali pers.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian sosial, dan ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Culla, Adi S. *Rekonstruksi Civil Society Wacana Dan Aksi Ornop Di Indonesia*, Jakarta: LP3S.
- Darma, Surya. 2012. *Manajemen Kinerja Falsafah, Teori Dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Dault, Adhyaksa. 2012. *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*. Jakarta: Rene Book.
- Fakih, Mansour. 2008. *Masyarakat Sipil Dan Transformasi Sosial Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanapiah, Pipin. 2001. *Visi, Misi, dan Strategi Ormas dan LSM dalam Pembangunan Daerah*. Bandung: UNPAD.
- Ilyas Y. 2001. *Kinerja (Teori, Penilaian dan Penelitian)*. Jakarta: Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan Universitas Indonesia.
- Jordan & Tuijl. 2009. *Akuntabilitas LSM Politik, Prinsip Dan Inovasi*. Jakarta: LP3S.
- Korten David C. 2001. *Menuju Abad ke-21, Tindakan Sukarela Dan Agenda Global*. Jakarta: Obor.
- Lincoln, Yvona S, dan Egon G. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Mahnun, Mohamad, 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Mangkunegara. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Moleong J, Lexi. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Praja, Ageng Nata. 2009. *Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society di kabupaten Grobogan*. Undip Semarang.
- Putra, Fadillah. 2009. *Senjakala Good Governance*. Malang: Averroes press..

- Purnamasari, Irma. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha* (hal. 33-34). [www.wikipedia.indonesia](http://www.wikipedia.indonesia).
- Rivai, Veithzal dan Basri. 2005. *Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rochman, Meuthia Gani. 2012. *Kultur Berorganisasi LSM Tertinggal*, dalam *Akuntabilitas*, edisi 1. Jakarta: Konsil LSM di Indonesia.
- Saidi, Zaim. 1995. *Secangkir Kopi Max Havelaar, LSM Dan Kebangkitan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Bekerja Sama Dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- Santika, Adhi. 2004. *Akuntabilitas Dan Transparansi LSM: Beberapa Sumbangan Pemikiran* (2004, hal. 104-110), Dalam Abidin, Hamid Dan Mimin Rukmini (editor), *Kritik Dan Otokritik LSM: Membongkar Kejujuran Dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Piramedia.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Sesatio, Bambang. 2012. *Republik Galau, Presiden Bimbang, Negara Terancam Gagal*. Jakarta: Ufuk Press.
- Srimindarti. 2006. *Balanced Scorecard Sebagai Alternatif untuk Mengukur Kinerja*. Semarang: STIE Stikubank. [www.duniaesai.com](http://www.duniaesai.com).
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulistiyani, Teguh. 2011. *Memahami Good Governance Dalam Perpestif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumarto, Hatfah SJ. 2009. *Inovasi, partisipasi, dan good governance*. Jakarta: Obor.
- Syakrani & Syahrani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perpestif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tika, P. 2006. *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Utomo Warsito. 2009. *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## JURNAL

- Fadlurrahman, Lalu. 2012. "Promoting Democratization And Good Governance: Rifka Annisa Women Crisis Center Yogyakarta".. *Journal Government and Politics*. Volume 3 Nomor 1 Februari 2012.
- Nawawi, Juanda. 2011. "Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan *Good Governane*". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*". Vol. 1 No. 3 Juni 2012.
- Wakhid, Ali Abdul. 2009. "Good Governance Dan Reformasi Birokrasi Mendukung Pembangunan Hukum". *Jurnal TAPIS* Vol. 5 No. 10 Juli-Desember 2009
- Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* ISSN: 2088-0685 Vol.1 No. 1, April 2011

## PERATURAN DAN DOKUMENTASI

603

- Organisasi Massa, yakni berdasarkan Pasal 1663-1664 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).
- UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“UU Ormas”).
- Badan Hukum, yakni berdasarkan Status blad 1870 No. 64, dengan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasankemudian di revisimenjadi UU No. 28 Tahun 2004 (“UU Yayasan”).
- Alimsyah Syamsuddin, Dkk, Parlemen Group, Praksis Pembelajaran Demokrasi, Makassar, KOPEL, 2011.
- Modul Program Penguatan Parlemen dan Pemberdayaan Institusi Lokal di Sulawesi Selatan, Makassar, KOPEL, 2005.
- Wakhyono S dan Rahman M A, Kaya Janji Miskin Produk, Rekam Jejak Kinerja DPRD Periode 2004-2009, Hasil Survey Kopel Sulawesi, di Kota Makassar, KabupatenGowa, dan Kabupaten Takalar, di Sulawesi Selatan, Kerja Sama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, Makassar, KOPEL dan PSHK, 2009.
- Herman, Wkhyono, Dan Mannaga A,F, Traffic Light APBD, Best Practices Dan Lesson Learned Advokasi Anggaran Di Sulawesi.
- Hasil Penelitian, Tim peneliti Fakultas Hukum Unhas dan Komisi Pemantau Legislatif, 2013, Potensi Korupsi Dana Bantuan Social Tahun 2008 dan Relasinya dengan Pejabat Publik di Sulawesi Selatan.
- Laporan Pertanggung Jawaban Kopel tahun 2010
- Laporan Pertanggung Jawaban Kopel tahun 2011
- Laporan Pertanggung Jawaban Kopel tahun 2012
- Kabar Pesisir edisi II, Januari-Maret 2011
- Kabar Pesisir edisi 3, Agustus-September 2012
- Kabar Pesisir edisi 4 Oktober-November 2012
- Kabar pesisir edisi 5 Desember-Januari 2013